



**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN PEKALONGAN
2019-2020**

Skripsi

Disusun oleh:

Muthia Risqilah

0221 18 307

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Juli 2023

LEMBAR PERSETUJUAN



**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN PEKALONGAN
2019-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar **Sarjana Akuntansi** Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis **Universitas Pakuan Bogor**

Mengetahui,

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, S.E., ME., Ph.D.)



Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN PEKALONGAN
2019-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Jumat, 28 Juli 2023

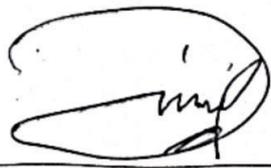
Muthia Risqilah

022118307

Diserujui,

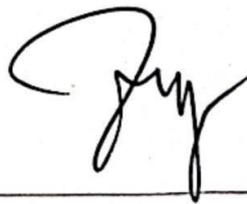
Ketua Penguji sidang

(ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A., PIA.)



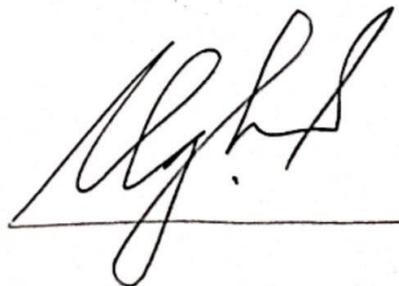
Ketua komisi pembimbing

(Asep Alipudin, S.E., M.Ak.)



Anggota Komisi Pembimbing

(Sigit Edi, Drs., Ak., M.M.)



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Risqilah

NPM : 022118307

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2023



Muthia Risqilah

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang menggunakan data atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Muthia Risqilah. 022118307. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pekalongan). Dibawah bimbingan : Asep Alipudin dan Sigit Edi, 2023.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan menggunakan empat variabel yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja harus dilaksanakan dengan baik. Sistem anggaran berbasis kinerja ini diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk melihat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan empat variabel yaitu, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja.

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 50 orang dari 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survey yang diperoleh dengan cara membagikan kuisioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 25.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terdapat pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sebaiknya pemerintah kabupaten Pekalongan dalam membuat perencanaan anggaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan agar dalam pelaksanaan anggaran kegiatan atau program yang sudah dianggarkan dapat terealisasi sesuai anggarannya. Pelaporan /pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali supaya target pencapaian kinerja 100% tercapai, dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan lebih baik.

Kata kunci: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Evaluasi Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil'alamin, Segala puji dan syukur seraya penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN PEKALONGAN”**

Dalam proses penyusunan Skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun Alhamdulillah tidak melunturkan semangat penulis dalam menyusun proposal ini. Dalam pembuatan Skripsi ini mulai dari perancangan, pencarian bahan, sampai penulisan, penulis mendapat bantuan, saran, petunjuk dari banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan materi maupun teknik penulisan. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT telah memberikan nikmat, karunia, perlindungan dan kesehatan kepada penulis selama melakukan penyusunan.
2. Bapak, Ibu, kakak yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat dan doa tiada henti untuk keberhasilan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektorat Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menuntut ilmu.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah L. SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Asep Alipudin, S.E., M.Ak., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian.

8. Bapak Sigit Edi, Drs., Ak., M.M. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian.
9. Dosen – dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
11. Kepada seseorang yang bernama mas “Bayu Boyka” terimakasih telah kebersamai penulis di hari hari yang tak mudah selama mengerjakan tugas akhir ini, sudah menemani menyebar kuisisioner, serta mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ataupun materi kepada saya.
12. Terima kasih kepada Tia Mutriani S.AK dan Tatang Hidayat S.Ak. Sudah menjadi teman selama menyusun skripsi ini
13. Terakhir, terimakasih untuk penulis Muthia Risqilah S.Ak. karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dalam tekanan, dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan doa dan bantuannya dalam penyusunan penelitian ini

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis sehingga dalam penyusunan dan penyelesaian proposal ini masih banyak sekali kekurangannya, namun kekurangan tersebut semoga dapat menjadi suatu proses pembelajaran bagi penulis. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga proposal penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Pekalongan, 18 juli 2023

Penulis

Muthia Risqilah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HAK CIPTA	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	3
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Maksud Penelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Akuntansi Sektor Publik.....	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	6
2.2 Anggaran Berbasis Kinerja.....	6
2.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja.....	7
2.2.2 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja.....	7
2.2.3 Perinsip Anggaran Berbasis Kinerja.....	8
2.2.4 Sistem keuangan berbasis kinerja	8
2.2.5. Pengelolaan Keuangan Daerah	10

2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12
2.3.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ..	13
2.3.3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13
2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	14
2.4.1 Peneliti Terdahulu.....	14
2.4.2. Kerangka Pemikiran	27
2.4.2.3.Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29
2.4.2.4 Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.....	29
2.5. Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	31
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
3.4. Operasionalisasi Variabel	32
3.5 Metode Penarikan Sampel	34
3.6 Metode Pengumpulan Data	34
3.7. Metode Analisis Data	34
3.7.4 Uji Hipotesis	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1. Sejarah Kabupaten pekalongan	38
4.2. Hasil Pengumpulan Data	39
4.2.2 Deskripsi data Variabel Anggaran Berbasis Kinerja	41
4.2.3. Deskripsi data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	46
4.3. Analisis Data	47

4.3.1. Hasil Uji Kualitas Data.....	47
4.3.2. Uji Validitas.....	47
4.3.1.2. Uji Reliabilitas.....	50
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3.4 Uji Normalitas.....	50
4.3.5. Uji Heterokedastisitas.....	51
4.3.2.2. Uji Multikolinearitas.....	52
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	53
4.3.2. Uji Hipotesis.....	54
4.3.2.2. Uji f.....	56
4.3.2.3. Uji Koefisien Determinasi.....	57
4.4 Pembahasan.....	57
BAB V.....	61
Simpulan dan Saran.....	61
5.1. Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

Daftar Gambar

Gambar 2 1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005)	9
Gambar 2 2 siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pusdiklatwas BPK, 2007).	14
Gambar 2 3 kerangka pemikiran	28

Gambar Tabel

tabel 4.1 Karakteristik Responden	39
Tabel 4.2 perencanaan anggaran	42
Tabel 4 3 Pelaksanaan anggaran	44
tabel 4 4 Pelaporn anggaran	44
tabel 4 5 Evaluasi kinerja	45
tabel 4 6 deskripsi data variable akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	46
tabel 4 7 uji validitas Perencanaan Anggaran	47
tabel 4 8 Uji Validitas Pelaksanaan anggaran	48
tabel 4 9 Uji validitas Evaluasi kinerja	49
tabel 4.10 uji validitas kinerja instansi pemerintah	49
tabel 4 11 uji hipotesis.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Anggaran adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi dalam menjalankan kegiatan/program. Pada sektor swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat tertutup untuk publik, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang wajib diketahui oleh publik untuk dikritik, dievaluasi, dan diberi saran untuk meningkatkan kinerja instansi. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. (Mardiasmo, 2011)

Reformasi dibidang pemerintahan hingga dikeluarkan Undang-Undang No.23/2014 dan Undang-Undang No.12/2008 yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP Nomor 58 Tahun 2005 membawa paradigma baru dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terjadi karena besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap kegiatan pada pemerintahan. Perubahan paradigma ini meliputi penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja, dan pertanggungjawabkan atas penyelenggaraan kegiatan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, keterbukaan informasi dan tuntutan penghindaran serta keberhasilan kegiatan yang berbau Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah dengan Pemendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan diperbaiki lagi menjadi Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan daerah. Anggaran berbasis kinerja menuntutnya adanya out-put optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan

belanja yang berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran (*Output*) dengan hasil (*Outcome*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasi (anggraini, 2010). Anggaran dengan pendekatan kerja menekankan pada konsep Value For Money dan pengawasan pada kinerja output. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat meninggalkan perencanaan yang telah disusun. Pendekatan anggran berbasis kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public (Mardiasmo, 2011).

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di pemerintah yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manejerial secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan penghargaan predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award 2019. Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo itu mengalami kenaikan nilai dari 2018 lalu. kabupaten pekalongan menempati peringkat 15 dari 29 kabupaten. Tetapi pada tahun 2017-2018 sesuai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pekalongan mendapatkan nilai "CC" dengan predikat CC maksudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (AKIP) cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Fenomena yang terjadi di pemerintah daerah kabupaten Pekalongan, memastikan akan memasukkan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(RAPBD) 2019. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi triwulan ketiga pada tahun 2018, rata-rata SKPD yang masuk kategori rendah adalah instansi yang memiliki anggaran belanja modal cukup tinggi. Seperti, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), serta Dinas Pendidikan. sebanyak 24 SKPD pemerintah daerah (pemda) Pekalongan realisasi belanja langsungnya rata-rata masih 70%, belum mencapai capaian kinerja. Dari total anggaran Rp 2,449 triliun, hanya terserap Rp 1,57 triliun anggaran yang berhasil dikelola SKPD, dan masih ada sisa sekitar Rp 872miliar.

(sumber: jatengprov.go.id)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk laporan kinerja yang harus di pertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanatkan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi serta rencana strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.**”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pemerintah daerah (pemda) Pekalongan realisasi belanja langsungnya rata-rata masih 70%, belum mencapai capaian kinerja. Dari total anggaran Rp 2,449 triliun, hanya terserap Rp 1,57 triliun anggaran yang berhasil dikelola SKPD, dan masih ada sisa sekitar Rp 872miliar.

1.2.2 Perumusan Masalah

Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalahnya yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimanapengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan?

4. Bagaimana pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan?
5. Apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan /pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja secara bersama sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Pekalongan) dan diharapkan hasil akhir dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Pekalongan), sehingga pemerintah daerah dapat mengelola sistem anggaran berorientasi pada visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk mengetahui apakah pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan.
4. Untuk mengetahui apakah Eevaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan.
5. Untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan

anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan.

1.4.Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini mencakup dua hal yaitu:

1. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk acuan dalam mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - b. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan dimasa depan.
 - c. Diharapkan pemerintah kabupaten Pekalongan dapat melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja dengan baik
2. Kegunaan Akademis
Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk menganalisis mengenai anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan ilmu akuntansi sektor publik secara umum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya Bastian (2010:3). Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Pendapat lain menurut Mardiasmo (2009:2) mendefinisikan “Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Sedangkan menurut Halim (2014:18). Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari definisi-definisi di atas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Bastian (2010) mengemukakan anggaran berbasis kinerja adalah “Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.”

menurut Darise (2008) anggaran berbasis kinerja adalah : “penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.” Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem perencanaan program yang akan dilakukan pemerintah dalam pendayagunaan anggaran yang berorientasi pada hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan rencana atau target.

Bappenas (2007) mengemukakan Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan teori diatas, Anggaran berbasis kinerja adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam Renja-SKPD disetiap unit-unit kerjanya didalam suatu instansi pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatannya kepada DPR dan Masyarakat luas.

2.2.2 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Tujuan dari penerapan anggaran berbasis kinerja (PP 21/2004)

- a. untuk memperoleh mamfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya (input) yang terbatas.
- b. mendukung perbaikan efesiensi dan efektivitas dalam pemamfaatan sumber daya

- c. memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah.

Menurut Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (2009) Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja adalah :

- a. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*).
- b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*).
- c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*)

2.2.3 Perinsip Anggaran Berbasis Kinerja

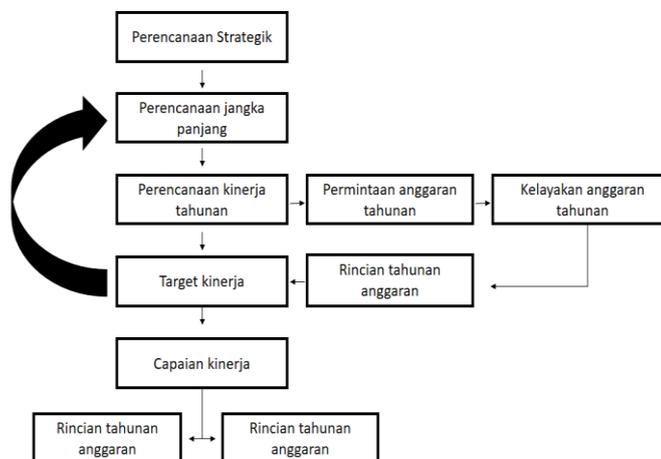
Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim (2007:178) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Transparansi dan akuntabilitas
2. Disiplin anggaran
3. Keadilan anggaran
4. Efisiensi dan efektivitas anggaran
5. Disusun dengan pendekatan kinerja

2.2.4 Sistem keuangan berbasis kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja suatu kerangka kerja yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja deputy IV BPKP (2005) yang menjelaskan pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri.

Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus. Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan bagaimana anggaran berbasis kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam rencana strategis secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005))

Berdasarkan gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa awal proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Penyusunan rencana strategis organisasi adalah proses untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dan menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholders utama. Pada umumnya rencana strategis memiliki jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program untuk mencapainya serta menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan suatu program kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang didalamnya memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah untuk periode tahunan.

Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil-hasil (outcome) yang akan dicapai dalam ahun bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan antar aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya. Rencana anggaran tahunan diajukan

kepada legislative untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif.

Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah disetujui masing-masing instansi menyusun rencana operasional tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya.

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang telah disetujui dan rencana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat kepada pihak yang menerima amanat tentang target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislative dengan pihak eksekutif yaitu dokumen kontrak kerja. Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja dilaporkan kedalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan evaluasi atau perbaikan ditahun berikutnya.

2.2.5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Pemandagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Anggaran

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintah dan meliputi semua bidang kehidupan

secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan Anggaran

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah (SEKDA). Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus :

- a. Menjamin anggaran bahwa akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan;
- b. Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro;
- c. Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaan. Menangani pembelian dan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan secara periodik yang mencakup:

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD

c. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

4. Evaluasi Kinerja

Merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas juga dapat berarti perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik/ berkala. Sumberdaya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumberdaya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya alam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hokum dan politik.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah “Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik/ berkala”.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik/berkala.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi Negara pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3.3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategis.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pusdiklatwas BPK, 2007).

Siklus kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategis (renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategis ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrument, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Peneliti Terdahulu

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang

sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian baik berupa tesis maupun jurnal-jurnal melalui internet.

Tabel 2. 1 penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
1	Edipson Bayer Silalahi (2017) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Variabel Moderating Komitmen Organisasi	Indikator : X1 : 1. Tujuan, 2. Kinerja. 3. Standar, 4. Jangka Waktu, 5. Sasaran Prioritas 6. Tingkat Kesulitan, 7. Koordinasi X2 : 1. Keandalan Data Laporan 2. Efektivitas dan efisiensi operasi 3. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. X3 : 1. Kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku 2. Rencana strategis 3. Perjanjian kinerja	1. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara parsial pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun memiliki nilai positif 2. Komitmen organisasi merupakan variable pemoderasi yang mampu memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
			4. Pengukuran kinerja 5. Pengelolaan data kinerja 6. Pelaporan kinerja Y : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja 6. Pemanfaatan Informasi Kinerja	
2.	Mulyadi AR, Syamsidar, Dedy Efendy (2018) Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh)	Variabel Independen: Sistem Pelaporan , dan Kejelasan Sasaran Anggaran Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indikator : X1 : 1. akurat, 2. relevan, 3. tepat waktu, 4. konsisten 5. dapat dipercaya. X2 : 1. Jelas 2. Spesifik	1. Sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh. 2. Sistem pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Aceh. 3. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
			3. dapat dimengerti	kinerja Instansi Pemerintah Aceh
3.	Surya Benediktus Manullang dan Syukriy Abdullah (2019) Pengaruh pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, dan pergantian kepala skpd terhadap akuntabilitas kinerja	Variabel Independen : Pengaruh pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, dan pergantian kepala SKPD Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja	Indikator : X1 : 1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 2. Reviu rencana kerja anggaran. 3. Reviu laporan keuangan. 4. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah daerah. 5. Evaluasi sistem pengendalian internal. 6. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 7. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. 8. Tugas pembantuan dan	1. Pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pergantian kepala SKPD secara simultan dan bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017. 2. Pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017. 3. Pergantian kepala SKPD berepengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
			<p>dana bantuan keuangan.</p> <p>9.Pemeriksaan terpadu dengan inspektorat jenderal kementerian / inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah.</p> <p>X2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka waktu 5. Sasaran prioritas 6. Tingkat Kesulitan 7. Koordinasi <p>X3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.SOP pergantian kepala SKPD. 2.SOP pergantian kepala SKPD. 3. Tipe kepemimpinan Kepala SKPD yang baru. 	

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
			<p>4. Pengaruh SKPD terhadap kinerja instansi.</p> <p>Y :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan. 2. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategi organisasi. 3. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program. 4. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan. 5. Akuntabilitas kinerja meningkatkan transparansi. 	
4.	<p>Dewi Rahmawati (2017)</p> <p>Pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran,</p>	<p>Indikator :</p> <p>X1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan 2. Pengaruh 3. Kontribusi <p>X2 :</p>	<p>Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tidak terdapat pengaruh moderasi yang signifikan terhadap kejelasan sasaran</p>

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
	anggaran (survei pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bandung barat)	Variabel Dependen : Senjangan Anggaran	1. Jelas 2. Spesifik 3. Dapat dipahami Y : 1. Pecapaian Anggaran 2. Standar Anggaran 3. Batasan Anggaran 4. Tuntutan Anggaran 5. Target Anggaran 6. Tingkat Kesulitan Pencapaian Target Anggaran	anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5.	Kukuh Prasetyaningrum (2019) Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bogor	Variable independen : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Dependen : Akuntabilitas kinerja pemerintah	Indikator : 1. Perencanaan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Evaluasi Kinerja 4. LAKIP	Perencanaan dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah tetapi dalam pelaksanaannya berpengaruh negative
6.	Raissa (2016) pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas	Variabel independen: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,	1. Perencanaan anggaran 2. Pelaksanaan anggaran	hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
	kinerja instansi pemerintah (pada SKPD Kab.Magelang)	pelaporan /pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja variabel dependen : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.Pelaporan / pertanggungjawaban 4.Evaluasi kinerja 5.LAKIP	pemerintah sedangkan pelaporan/pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kab.Magelang.
7	Ana Muchlisa Rezeqiah (2017) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	Variable X : Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indikator (X): 1) Persiapan Anggaran 2) Ratifikasi Anggaran 3) mplementasi Anggaran 4) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Indikator (Y) : 1) Rencana Strategis 2) Perencanaan Kinerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kmerja instansi pemerintah
8	Wibisono (2016) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi	Variabel bebas: 1. Perencanaan anggaran 2.Implementasi anggaran 3. Pertanggung jawaban anggaran	indikator (X): 1) Persiapan Anggaran 2) Ratifikasi Anggaran 3) mplementasi Anggaran	Perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
	pada Kota Surabaya	Variabel terikat: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Indikator (Y) : 1) Rencana Strategis 2) Perencanaan Kinerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja	
9	Dadan Ginanjar, Fachruddin Pasolo, Adolf Siahay, Kasim Saleh (2019) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Polda Papua)	Variable X : Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indikator (X): 1) Persiapan Anggaran 2) Ratifikasi Anggaran 3) mplementasi Anggaran 4) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Indikator (Y) : 1) Rencana Strategis 2) Perencanaan Kinerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki hubungan positif dan tidak signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelaksanaan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan , pelapoan/pertanggungjawab an anggaran memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan evaluasi kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
10	M. Fadhil Junery, S.El.,M.E,Sy & Norhanisah, S.Akun (2019) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)	Variable X : Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Y : Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah daerah	Indikator (X): 1) Persiapan Anggaran 2) Ratifikasi Anggaran 3) mplementasi Anggaran 4) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Indikator (Y) : 1) Rencana Strategis 2) Perencanaan Kinerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja	hasil pengujian statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 3,060 dengan t tabel sebesar 0,282 dan menunjukkan bahwa Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh cukup positif terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Selain itu, diperoleh korelasi antara pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah sebesar $R = 0,408$, yang termasuk dalam kategori hubungan sangat lemah. Dapat pula diketahui besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu sebesar 16,6%.
11	Herlina (2019) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makasar (2019)	Variable independen : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Dependen : Akuntabilitas kinerja pemerintah	Indikator (X): 1) Persiapan Anggaran 2) Ratifikasi Anggaran 3) mplementasi Anggaran 4) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Indikator (Y) : 1) Rencana Strategis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan anggaran berbasis kinerja yang diukur dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan evaluasi kinerja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu dalam hal ini pada Pemerintah Kota Makassar.

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
			2) Perencanaan Kinerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja	
12	J.R. Patiruhu. Stenley J.Ferdinandus. welmin Marlo Komul (2018) Analisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan (studi empiris pada badan pencarian dan pertolongan)	Variable independen : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Dependen : Akuntabilitas kinerja pemerintah	Indikator : X1 : 1. Keterlibatan 2. Pengaruh 3. Kontribusi X2 : 1. Jelas 2. Spesifik 3. Dapat dipahami Y : 1. Pecapaian Anggaran 2. Standar Anggaran 3. Batasan Anggaran 4. Tuntutan Anggaran 5. Target Anggaran 6. Tingkat Kesulitan Pencapaian Target Anggaran	Partisipasi penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial, evaluasi anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja manajerial, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial , perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
13	Syaripuddin, sutriana Basri (2017) Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kediri)	Variable independen : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Dependen : Akuntabilitas public	indikator (X): 1) Persiapan Anggaran 2) Ratifikasi Anggaran 3) Implementasi Anggaran 4) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Indikator (Y) : 1) Rencana Strategis 2) Perencanaan Kinerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD kota Kendari dan evaluasi kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. yang artinya bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas publiknya.
14	ELFRIDA SIREGAR (2020) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pertahanan Kota Palembang	Variable independen : Anggaran Berbasis Kinerja System pelaporan keuangan Variabel Dependen : Akuntabilitas kinerja	indikator (X): 1) Persiapan Anggaran 2) system pelaporan keuangan 3) mplementasi Anggaran Indikator (Y) : 1) Rencana Strategis 2) Perencanaan Kinerja	Hasil statistik secara simultan menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $19,165 > 3,295$. Variabel bebas terhadap Akuntabilitas Kinerja mempunyai kontribusi sebesar 54,5 persen, sedangkan 45,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Kata kunci anggaran berbasis kinerja,

No	Nama Penulis	Variabel	Indicator	Hasil Penelitian
			3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja	sistem pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja.
15	Muhammad Sya' Roni (2018) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kota Surabaya	Variable independen : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Dependen : Akuntabilitas kinerja	indikataor (X): 1) Persiapan Anggaran 2) Implementasi Anggaran 3) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Indikator (Y) : 1) Rencana Strategis 2) Perencanaan Kinerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja	Hasil Analisis Regresi menunjukkan variabel perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Model Regresi linier berganda dalam penelitian memiliki nilai R2 sebesar 0,636 atau 63,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 63,60% sedangkan sisanya 36,40% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. Kata kunci: perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas kinerja.

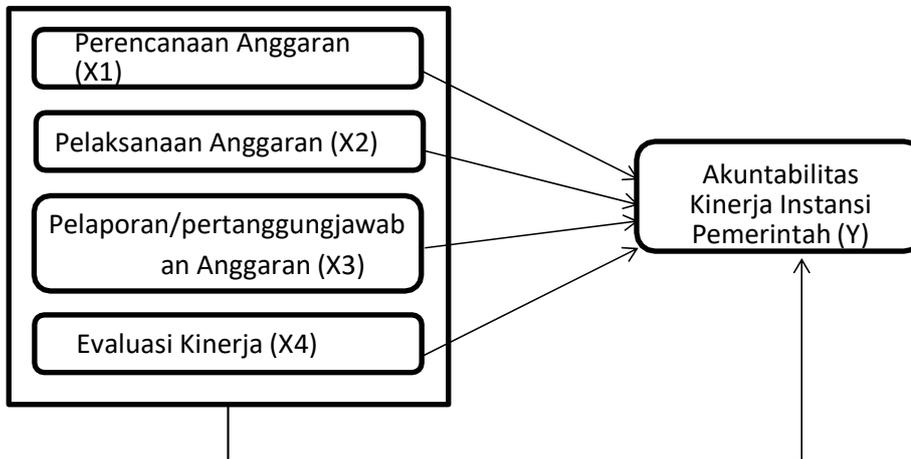
2.4.2. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah dan didanai oleh dana publik yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadi reformasi penganggaran daerah dari anggaran tradisional yang bersifat line-item dan incremental menjadi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat pada visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mempunyai program prioritas adalah program yang berorientasi pada kepentingan publik. Visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang merupakan elemen anggaran berbasis kinerja menyebabkan anggaran berbasis kinerja perlu menterjemahkan tujuan dalam sasaran yang lebih terukur, sasaran kedalam program, dan program kedalam kegiatan dengan output terukur.

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dalam pernyataan (Bastian. 2006:54) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, maka dibuatkan skema kerangka pikir menggunakan Analisis Regresi linear sederhana. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dibuat dalam bentuk skema berikut ini:



Gambar 2.3 kerangka pemikiran

2.4.2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Perencanaan anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan telah dirumuskan dalam renstra organisasi, yang dinyatakan dalam satuan keuangan, dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja organisasi dapat menggagalkan perencanaan yang sudah direncanakan. Anggaran adalah managerial for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan No. 23 Tahun 2014.

2.4.2.2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan pemerintah berpegang pada anggaran yang ditetapkan, sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya juga tercapainya sasaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran seharusnya mempunyai kualitas yang baik dan realistis, dengan adanya pengendalian keuangan yang efektif, pelaksanaan anggaran dapat lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

2.4.2.3. Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputy IV BPKP (2005:16) menyatakan bahwa: “akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”. Penelitian yang dilakukan oleh Raissa (2016), Sefryana (2014), dan Luky (2015) membuktikan bahwa pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.4.2.4 Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Modul Akuntabilitas Instansi (2007), tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang, sehingga dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012), Sefryana (2014), dan Nurhayanti (2014) membuktikan bahwa evaluasi kinerja anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.4.2.5. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Halim (2007) menjelaskan bahwa elemen-elemen yang penting harus ditetapkan terlebih dahulu dalam anggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi
- c. Pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dan prestasinya.
- d. Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan

dalam manajemen perencanaan, pemograman, penganggaran dan evaluasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani Yulia Friska (2015) dan Lucky (2015) membuktikan bahwa variabel-variabel dari penerapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Hipotesis 1 : Perencanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Hipotesis 2 : Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Hipotesis 3 : Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Hipotesis 4 : Evaluasi Kinerja Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Hipotesis 5 : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran dan Evaluasi Kinerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Pekalongan) ”** penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif yang merupakan data primer. Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Menurut Umar (2003) didalam Ridwan (2016). Peneliti menggunakan desain penelitian ini agar mengetahui apakah penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dengan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai variabel independen berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai variabel dependen.

Unit analisis yang digunakan adalah Unit analisis yang digunakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah /geografis regional, maksud dari geografis regional adalah wilayah/daerah/Negara, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respon) suatu wilayah/daerah/Negara tertentu.

Lokasi penelitian ini merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian ini akan dilakukan pada lingkup pemerintah Kabupaten Pekalongan.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat dalam 5 instrumen penelitian, yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja yang diukur dengan empat variable, yaitu (perencanaan anggaran,pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran,evaluasi kinerja) dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jenis data dalam penelitian ini berupa

jenis data subyek yang diperoleh berupa opini, sikap, pengalaman dan karakteristik dari responden yang menjadi subyek penelitian.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari :

- perencanaan anggaran
- pelaksanaan anggaran
- pelaporan/pertanggungjawaban
- evaluasi kinerja

dan variable dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kuisioer yang digunakan untuk mengukur penelitian ini adalah kuisioer yang sudah dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variable ini. Untuk mengukur variable ini dengan menggunakan skala likret yaitu : sekor 5(Sangat Setuju), sekor 4 (Setuju), sekor 3 (Ragu-Ragu), sekor 2 (Tidak Setuju) dan sekor 1(Sangat Tidak Setuju).

Definisi operasional dan pengukuran variabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Oprasional Variabel.

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Instansi Pemerintah
(SKPD Kabupaten Pekalongan)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Variabel X)	1. Perencanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan program kerja yang terukur • Dokumen Kebijakan Umum anggaran berdasarkan pada dokumen RKPD 	Ordinal
		<ul style="list-style-type: none"> • Tahapan-tahapan perencanaan anggaran • Substansi atas program kerja yang sesuai dengan visi dan misi 	

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
		pemerintah Kab. Pekalongan	Ordinal
	2. Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pelaksanaan Anggaran, SKPD Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan SKPD dalam pelaksanaannya telah mengetahui prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum 	Ordinal
	3. Pelaporan/ Pertanggung jawaban Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan Pencapaian hasil Kerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan 	Ordinal
	4. Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi hasil kerja sesuai dengan sasaran, visi dan misi organisasi 	Ordinal
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Variabel Y)	Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pekalongan 	Ordinal

3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi ini adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kab pekalongan , dengan jumlah responden sebanyak 50 responden. Metode yang digunakan adalah simple random sampling, yang mana pengambilan sampel berdasarkan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut, serta dalam pengambilan sampel tersebut dapat diberikan informasi yang digunakan oleh peneliti.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variable-variabel yang digunakan. Modus komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner, kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang akan dibagikan kepada bagian perencanaan dan pelaporan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setiap kuisisioner yang dibagikan kepada para responden disertai surat permohonan kuisisioner.

3.7. Metode Analisis Data

Analisis ini merupakan analisis kuantitatif karena data yang digunakan adalah data primer yaitu dilakukan dengan teknik dengan cara survey yaitu menyebar kuisisioner untuk mengungkap variable penelitian, yang mengemukakan tentang data diri responden. Yang diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuisisioner, kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden itu selanjutnya dihiung presentasinya.

3.7.1 Pengujian kualitas Data

3.7.1.1 Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melaukan korelasi bilvariate antara masing – masing skor indikator dengan correlation (Ghozali,2016). Dengan kriteria jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka butir / pertanyaan-pertanyaan dikatakan valid.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden sehingga kesungguhan jawaban dapat dipercaya. Untuk melihat.

reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dilakukan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas akan diketahui dengan menggunakan software SPSS. Uji ini dilakukan untuk mengetahui nilai koefisien Cronbach Alpha instrumen masing-masing variabel. Instrumen dikatakan reliabel bila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2016:48).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik yang tujuannya agar didapat perkiraan yang tidak bias. Ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:160). Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas dengan analisis grafik dapat dilihat dari tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot, kriteria pengambilan keputusan dengan analisis grafik sebagai berikut: jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan Kolmogorov Smirnov, kriteria pengambilan keputusan uji Kolmogorov Smirnov menurut Ghozali (2016:154) sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan atau probabilitas $< 0,05$ maka variabel residual dinyatakan berdistribusi tidak normal.
- b. Jika nilai signifikan atau probabilitas $> 0,05$ maka variabel residual dinyatakan berdistribusi data normal.

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari penelitian ini adalah uji menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di – studentized. Dasar analisis :

1. Jika tidak ada pola Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah heteroskedastisitas.
2. yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui tingkat korelasi antar variabel independen regresi. Model regresi yang baik adalah model yang antar variabel independennya tidak memiliki korelasi yang kuat. Multikolinieritas dapat disebabkan oleh adanya efek kombinasi 2 atau lebih variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen (Ghozali,2016:104). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Nilai umum yang biasa dipakai dalam pengambilan keputusan adalah: Jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan atau mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- | | |
|-----------|--|
| Y | = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| α | = Konstanta |
| β_1 | = Koefisien regresi untuk Kejelasan Sasaran Anggaran |
| X1 | = Kejelasan Sasaran Anggaran |
| β_2 | = Koefisien regresi untuk Pelaporan Anggaran |
| X2 | = Pelaporan Anggaran |
| E | = Error |

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu atau ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

3.7.4.2 Pengujian Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Kriteria pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika nilai t hitung < t tabel atau sig. > 0,05, maka H₀ diterima atau H_a ditolak, itu berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen bila dilakukan uji secara parsial.
2. Jika nilai t hitung > t tabel atau sig. < 0,05, maka H₀ ditolak atau H_a diterima, itu berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen bila dilakukan uji secara parsial.

3.7.4.3 Pengujian Simultan (Uji F)

Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016).

1. Hipotesis

Hipotesis = perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara serempak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Kriteria pengujian

Jika probabilitas > 0,05 maka H_a ditolak

Jika probabilitas < 0,05 maka H_a diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 13 kelurahan, dan 272 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 934.929 jiwa dengan luas wilayah 837,00 km² dan sebaran penduduk 1.117 jiwa/km². Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kajen. Kajen, dulunya merupakan kota kecamatan yang telah dikembangkan menjadi ibu kota kabupaten yang baru, menggantikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang berlokasi di Jl. Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan. Pindahan Ibu kota Kabupaten Pekalongan ke Kajen, dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2001, walaupun SK Mendagri sudah diterbitkan pada tahun 1996. Hal ini terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pemerintah di Kota Kajen yang dilaksanakan secara bertahap

4.1.1. Sejarah Kabupaten pekalongan

Keberadaan Kabupaten Pekalongan secara administratif sudah berdiri cukup lama yaitu 3812 tahun yang lalu. Berdasarkan kajian ilmiah oleh Tiem Peneliti Sejarah Kabupaten Pekalongan muncul lima prakiraan tentang kapan Kabupaten Pekalongan itu lahir, lima prakiraan yang menjadi kajian adalah masa prasejarah, masa Kerajaan Demak, masa Kerajaan Islam Mataram, masa Penjajahan Hindia Belanda dan masa Pemerintahan Republik Indonesia.

Hari Jadi Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan pada Hari Kamis Legi Tanggal 25 Agustus 1622 atau pada 12 Robiu'l Awal 1042 H pada masa pemerintahan Kyai Mandoeraredja, beliau merupakan Bupati/Adipati yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo/ Raja Mataram Islam dan sekaligus sebagai Bupati Pekalongan I, sedangkan penentuan hari dan tanggalnya diambil dari sebagaimana tradisi pengangkatan Bupati dan para pejabat baru dilingkungan Kerajaan Mataram. Pembangunan Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan sejak zaman Pemerintahan Adipati Notodirdjo (1879 -1920 M) di komplek Alun-alun utara no 1 Kota Pekalongan, bangunan tersebut merupakan rumah bagi para Bupati Pekalongan sekaligus sebagai tempat aktivitas perangkat pemerintahan dengan berbagai elemen masyarakat untuk bersilaturahmi, bermusyawarah dan mencurahkan pemikiran atau unek-unek berbagai kehendak dihadapan bupati. Proses pemindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan diawali dengan peresmian sekaligus penggunaan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan di Kajen oleh Bupati Drs. H Amat Antono pada tanggal 25 Agustus 2001, kepindahan itu merupakan salah

satu tonggak sejarah sebagai momen diawalinya Kajen sebagai Ibukota Kabupaten Pekalongan.

Secara bertahap pembangunan untuk melengkapi prasarana menjadi simpul-simpul pergerakan dan pengembangan sebagai sebuah ibukota kabupaten juga telah dibangun rumah dinas Bupati dan Pendopo yang selesai bertepatan dengan hari Jum'at Pon 19 Dzulhijjah 1423 H atau tanggal 21 Pebruari 2003 yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pada tanggal 5 April 2003. Untuk mendayagunakan kegiatan pembangunan daerah secara merata diperlukan suatu acuan untuk memotivasi, menggerakkan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat Kabupaten Pekalongan Motto Kabupaten Pekalongan adalah Kota " SANTRI" merupakan singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapih dan Indah.

Kata Pekalongan berasal kata kalong, yang berarti "kelelawar" dalam bahasa Jawa. Menurut legenda, Raden Bahurekso (bupati Kendal I), seorang abdi dalem Sultan Agung, diberi perintah oleh Sultan Agung untuk membangun sebuah daerah di sebelah barat Kota Kendal, Raden Bahu pun melakukan tapa ngalong (bertapa seperti kelelawar) di daerah ini.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

tabel 4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik Responden

pengelompokan Data		Frekuensi	presentase
			100%
Jenis Kelamin	Peria	24	53%
	Wanita	26	58%
Latar Belakang pendidikan	Ekonomi	30	67%
	Hukum	4	9%
	Teknik	4	9%
	Sosial	6	13%
	Lainnya	6	13%
tingkat pendidikan	SLTA	4	9%
	D3	3	7%
	S1	25	56%

	S2	15	33%
	S3	3	7%
Jabatan	Kepala Dinas, Badan/Kantor	3	7%
	Kasubid/Kasubag	14	31%
	Sekretaris	5	11%
	Staf	28	62%
Lama bekerja	1-5 Tahun	14	31%
	6-10 Tahun	8	18%
	11-15 Tahun	16	36%
	16 - 20 Tahun	5	11%
	>21 Tahun	7	16%

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa responden laki – laki sebanyak 24 orang atau sekitar 53% lebih kecil dibandingkan jumlah responden perempuan yang berjumlah 26% orang atau sekitar 58% dari jumlah keseluruhan kuisioner.

b. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa kebanyakan latar belakang pendidikan responden yaitu latar belakang pendidikan ekonomi sebanyak 30 responden atau sekitar 67% untuk latar belakang pendidikan Hukum sebanyak 4 responden atau 9%, latar belakang pendidikan Teknik 4 responden atau 9%, latar belakang pendidikan sosial sebanyak 6 responden atau 13%, latar belakang pendidikan lainnya sebanyak 6 responden atau 13%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagian besar pendidikan ekonomi sehingga diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik dibidangnya.

c. Tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa pendidikan responden yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran secara langsung lebih banyak bergelar Sarjana (S1) yaitu 25 responden , gelar Sarjana (S2) 15 responden, gelar Diploma (D3) 3 sedangkan gelar sarjana (S3) 3 responden dan sisanya pendidikan SLTA 4 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagian besar pendidikan sarjana

sehingga diharapkan keterampilan dan pengetahuan yang baik di bidangnya.

d. Jabatan

Berdasarkan table 4.1, dapat diketahui bahwa kebanyakan responden adalah staf dari setiap SKPD berjumlah 28 responden, sekretaris 5 responden, dan kasubid/kasubag 14 sedangkan kepala dinas/kantor dan kepala bidang 3 responden.

e. Lama Bekerja

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah 16 responden atau 36% dengan lama bekerja 11-15 tahun, 5 responden atau 11% dengan lama bekerja 16-20 tahun, 8 rsponden atau 18% dengan lama bekerja 6-10 tahun, 14 responden atau 31% degan lama bekerja 1-5 tahun, dan 7 reponden atau 16% dengan lama bekerja >21 tahun dari jumlah keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan responden yang terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran adalah responden yang lama masa kerjanya 11-15 tahun dan pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan

4.2.2 Deskripsi data Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

Untuk menganalisis jawaban responden variable Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3), Evaluasi kinerja (X4), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), peneliti menggunakan 5 skala likert yaitu:

1 = Sangat Tidak Stuju (STS)

2 = Tidak Stuju (TS)

3 = Ragu (R)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

tabel 4 2 Kriteria Penilaian Berdasarkan Nilai Penafsiran

Interval	Kriteria
1,00 – 1,80	Sangat Kurang
1,81 – 2,60	Kurang
2,61 – 3,40	Cukup/Sedang
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat Baik

Yang terkait dengan pernyataan – pernyataan dengan variabel dengan variabel penerapan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3), evaluasi kinerja (X4), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang terdapat dalam kuisisioner, yaitu :

1. Perencanaan Anggaran (X1)

Tabel 4.3 perencanaan anggaran

No Pertanyaan	Penilaian Responden					Total	nilai rata-rata	kriteria penilaian
	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)			
	F	F	F	F	F			
1	2	1	0	14	33	50		
Nilai	2	2	0	56	165	225	4,38	Sangat Baik
2	0	1	1	20	28	50		
Nilai	0	2	3	80	140	225	4,38	Sangat Baik
3	0	0	1	16	33	50		
Nilai	0	0	3	64	165	232	4,38	Sangat Baik
4	0	0	1	20	29	50		
Nilai	0	0	3	80	145	228	4,38	Sangat Baik
5	0	2	1	22	25	50		
Nilai	0	4	3	88	125	220	4,38	Sangat Baik
6	0	2	4	24	20	50		
Nilai	0	4	12	96	100	212	4,38	Sangat Baik
7	0	0	4	24	22	50		
nilai	0	0	12	96	110	218	4,38	Sangat Baik
8	0	2	2	23	23	50		
Nilai	0	4	6	92	115	217	4,38	Sangat Baik
9	2	3	3	21	21	50		
Nilai	2	6	9	84	105	206	4,38	Sangat Baik
10	2	3	0	26	19	50		
Nilai	2	6	0	104	95	207	4,38	Sangat Baik

Sumber Data Primer, data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan tabel 4.3 Variabel X1 Perencanaan Anggaran dengan kriteria penilaian Sangat baik. Menunjukkan bahwa untuk item pernyataan satu, responden

menjawab sangat setuju dengan nilai total 165 menjawab sangat setuju bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai. Untuk item pernyataan dua responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 140 bahwa RKPD memuat program kinerja yang terukur dan pendanaannya. Untuk pernyataan tiga responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 165 Dokumen KUA di dasarkan pada dokumen RKPD pada periode tersebut. Untuk pernyataan empat responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 145 bahwa SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD. Untuk pernyataan lima responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 125 bahwa penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Untuk item pernyataan enam responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 100 bahwa adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pada pernyataan tujuh responden menjawab sangat setuju dengan nilai 110 bahwa dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. Untuk pernyataan delapan responden banyak memilih sangat setuju dengan nilai total 115 bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA, dan PPAS yang telah disepakati oleh DPRD dan SKPD itu sendiri. Untuk item pernyataan Sembilan responden banyak memilih sangat setuju dengan nilai total 105 bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan kompilasi Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) menjadi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. Untuk pernyataan sepuluh responden lebih banyak memilih setuju dengan nilai total 104 bahwa penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evaluasi APBD dari kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan Anggaran (X2)

Tabel 4 4 Pelaksanaan anggaran

No Pertanyaan	Penilaian Responden					Total	Nilai Rata-Rata	Kriteria penilaian
	STS (1)	TS (2)	R (1)	S (4)	SS (5)			
	F	F	F	F	F			
1	0	1	1	20	28	50		
Nilai	0	2	3	80	140	225	4,49	Sangat Baik
2	0	0	1	19	30	50		
Nilai	0	0	3	76	150	229	4,49	sangat Baik
3	0	3	1	19	27	50		
Nilai	0	6	3	76	135	220	4,49	Sangat Baik

Sumber Data Primer, data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan dari tabel 4.4 Variabel (X2) Perencanaan Anggaran dengan kriteria penilaian Sangat Baik. Menunjukkan bahwa pernyataan nomor 1 mengenai pelaksanaan anggaran responden menanggapi sangat setuju dengan nilai total 140. Bahwa dalam pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rencana anggaran kas yang telah di sah kan. Berdasarkan dari table 4.4, pernyataan nomor 2 mengenai pelaksanaan anggaran responden menanggapi sangat setuju dengan nilai total 150. Bahwa dokumen anggaran kas dan dokumen pelaksanaan anggaran digunakan oleh bendahara umum daerah sebagai acuan dalam penyedia dana setiap SKPD. Berdasarkan dari table 4.4, pernyataan nomor 3 mengenai pelaksanaan anggaran responden menanggapi sangat setuju dengan nilai total 135 bahwa SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang ercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan anggaran kas.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3)

tabel 4 5 Pelaporn anggaran

No Pertanyaan	Penilaian Responden					Total	Nilai Rata- Rata	Kriteria Penilaian
	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)			
	F	F	F	F	F			
1	1	3	2	19	25	50		
Nilai	1	6	6	76	125	214	4,41	Sangat Baik
2	0	1	3	17	29	50		
Nilai	0	2	9	68	145	224	4,41	Sangat Baik
3	0	1	2	19	28	50		
Nilai	0	2	6	76	140	224	4,41	Sangat Baik

Berdasarkan dari table 4.5, Variabel X3 Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran dengan kriteria penilaian Sangat Baik Menunjukkan pernyataan nomor 1 mengenai pelaporan/pertanggung jawaban anggaran responden menanggapi sangat setuju dengan nilai total 125 bahwa setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Berdasarkan dari table 4.5, pernyataan nomor 2 mengenai pelaporan/pertanggungjawaban anggaran responden menanggapi sangat setuju dengan nilai total 145 bahwa sebagian besar responden menanggapi sangat setuju bahwa laporan keuangan SKPD dan PEMDA yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan tabel diatas 4.5, pernyataan 3 mengenai pelaporan/pertanggungjawaban anggaran responden menanggapi sangat setuju dengan nilai total 140 bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan PEMDA dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK da bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

4. Evaluasi kinerja (X4)

tabel 4 6 Evaluasi kinerja

No Pertanyaan	Penilaian Responden					Total	Nilai Rata-Rata	kriteria Penilaian
	STS	TS	R	S	SS			
	F	F	F	F	F			
1	1	1	3	24	21	50		
Nilai	1	2	9	96	105	213	4,42	Sangat Baik
2	0	1	8	24	17	50		
Nilai	0	2	24	96	85	207	4,42	Sangat Baik
3	2	2	12	18	26	60		
Nilai	2	4	36	72	130	244	4,42	Sangat Baik

Sumber Data Primer, data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan dari tabel 4.6, Variabel X4 Evaluasi Kinerja dengan kriteria penilaian Sangat Baik. Menunjukkan pernyataan 1 mengenai evaluasi kinerja responden menanggapi sangat setuju dengan nilai total 105 bahwa setiap SKPD mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan dari tabel 4.6, pernyataan 2 mengenai evaluasi kinerja responden menanggapi setuju dengan nilai total 95 bahwa setiap SKPD mengadakan evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan dari tabel 4.6, pernyataan 3 mengenai evaluasi kinerja responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 130 bahwa setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai

target anggaran.

4.2.3. Deskripsi data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)

tabel 4 7 deskripsi data variable akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No Pertanyaan	Penilaian Responden					Total	Nilai Rata-Rata	Kriteria Penilaian
	STS (1)	TS (2)	R (3)	S (4)	SS (5)			
	F	F	F	F	F			
1	0	0	4	30	16	50		
Nilai	0	0	12	120	80	212	4,16	Baik
2	0	1	3	25	21	50		
Nilai	0	2	9	100	105	216	4,16	Baik
3	1	5	4	24	16	50		
Nilai	1	10	12	96	80	199	4,16	Baik
4	0	0	4	26	20	50		
Nilai	0	0	12	104	100	216	4,16	Baik
5	1	0	3	26	20	50		
Nilai	1	0	9	104	100	214	4,16	Baik
6	1	0	3	26	20	50		
Nilai	1	0	9	104	100	214	4,16	Baik
7	0	0	5	26	19	50		
Nilai	0	0	15	104	95	214	4,16	Baik
8	0	0	4	21	25	50		
Nilai	0	0	12	84	125	221	4,16	Baik
9	0	2	9	9	19	39		
Nilai	0	4	27	36	95	162	4,16	Baik
10	1	0	4	24	21	50		
Nilai	1	0	12	96	105	214	4,16	Baik

Sumber Data Primer, data diolah oleh penulis 2022

Berdasarkan tabel 4.7, pernyataan 1 responden menjawab setuju dengan nilai 120. Adanya keterkaitan yang erat antara program dan kebijakan dengan pencapaian kinerja, pernyataan 2 responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 105 bahwa kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pimpinan, pernyataan 3 responden menjawab setuju dengan nilai total 96 bahwa Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strateguk organisasi, pernyataan 4 responden menjawab setuju dengan nilai total 104 bahwa indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap program harus dimengerti oleh semua aparat dan pimpinan, pernyataan 5 responden menjawab setuju dengan nilai total 104 bahwa melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang telah selesai dilaksanakan, pernyataan 6 responden menjawab setuju dengan nilai total 104 bahwa

membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan, pernyataan 7 responden menjawab setuju dengan nilai total 104 bahwa melakukan pengecekan terhadap jalannya program, pernyataan 8 responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 125 bahwa pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program, pernyataan 9 responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 95 bahwa kegiatan/program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Pernyataan 10 responden menjawab sangat setuju dengan nilai total 105 bahwa LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Hasil Uji Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data dalam hal ini, data memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti akan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, oleh karena itu benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Dilain pihak, benar tidaknya data, bergantung pada baik tidaknya instrumen data, kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan *valid* dan reliabel

4.3.2. Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Perencanaan Anggaran (X1)

tabel 4 8 uji validitas Perencanaan Anggaran

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	1	0,2306	0,636	Valid
	2	0,2306	0,781	Valid
	3	0,2306	0,792	Valid
	4	0,2306	0,790	Valid
	5	0,2306	0,832	Valid
	6	0,2306	0,806	Valid
	7	0,2306	0,759	Valid
	8	0,2306	0,857	Valid

	9	0,2306	0,786	Valid
	10	0,2306	0,761	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas data X1 pada tabel 4.8, untuk masing-masing butir pernyataan berjumlah 10 bernilai positif menunjukkan r hitung $>$ r tabel. Dengan demikian data tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Anggaran (X2)

tabel 4 9 Uji Validitas Pelaksanaan anggaran

Variable	Item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Pelaksanaan Anggaran (X2)	1	0,2306	0,894	Valid
	2	0,2306	0,748	Valid
	3	0,2306	0,926	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas data X2 pada tabel 4.9, untuk masing-masing butir pernyataan berjumlah 3 bernilai positif menunjukkan r hitung $>$ r tabel. Dengan demikian data tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas Pelaporan/Pertanggungjawaban (X3)

tabel 4 10 uji Validitas Pelaporan/pertanggungjawaban

Variable	item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Pelaporan/Pertanggungjawaban (X3)	1	0,2306	0,916	valid
	2	0,2306	0,915	valid
	3	0,2306	0,941	valid

Berdasarkan hasil uji validitas data X3 pada tabel 4.10, untuk masing-masing butir pernyataan berjumlah 3 bernilai positif menunjukkan r hitung $>$ r tabel. Dengan demikian data tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas Evaluasi Kinerja (X4)

tabel 4.11 Uji validitas Evaluasi kinerja

Variable	item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Evaluasi Kinerja (X4)	1	0,2306	0,812	valid
	2	0,2306	0,898	valid
	3	0,2306	0,809	valid

Berdasarkan hasil uji validitas data X4 pada tabel 4.11, untuk masing-masing butir pernyataan berjumlah 3 bernilai positif menunjukkan r hitung > r tabel. Dengan demikian data tersebut dinyatakan valid

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y1)

tabel 4.12 uji validitas kinerja instansi pemerintah

Variabel	item	r tabel	r hitung	keterangan
Akuntabilitas Kinerja (Y)	1	0,2306	0,738	Valid
	2	0,2306	0,769	Valid
	3	0,2306	0,701	Valid
	4	0,2306	0,798	Valid
	5	0,2306	0,689	Valid
	6	0,2306	0,734	Valid
	7	0,2306	0,845	Valid
	8	0,2306	0,810	Valid
	9	0,2306	0,717	Valid
	10	0,2306	0,714	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas data Y pada tabel 4.12, untuk masing-masing butir pernyataan berjumlah 10 bernilai positif menunjukkan r hitung $>$ r tabel. Dengan demikian data tersebut dinyatakan valid

4.3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas satu skor dari suatu instrumen pengukuran. Uji reliabilitas hanya dilakukan pada pertanyaan yang dianggap sah. Koefisien *cronbach's* yang lebih dari nilai r tabel disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika *alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu, *cronbach's alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal realibilitasnya

Tabel 4 13 uji reabilitas

Variabel	Cronbach'a Alpha	N of Items
Perencanaan Anggaran (X1)	0,917	10
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0,817	3
Pelaporan/pertanggungjawaban (X3)	0,899	3
Evaluasi Kinerja (X4)	0,77	3
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,906	10

Berdasarkan tabel tersebut, hasil *Cronbach's Alpha (X1)* sebesar 0,917 lebih besar dari 0,60 dan dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan tabel tersebut, hasil *Cronbach's Alpha (X2)* sebesar 0,817 lebih besar dari 0,60 dan dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan tabel tersebut, hasil *Cronbach's Alpha (X3)* sebesar 0,899 lebih besar dari 0,60 dan dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan tabel tersebut, hasil *Cronbach's Alpha (X4)* sebesar 0,770 lebih besar dari 0,60 dan dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan tabel tersebut, hasil *Cronbach's Alpha (Y)* sebesar 0,906 lebih besar dari 0,60 dan dapat dikatakan reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas.

4.3.4 Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov

Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Namun jika hasil Kolmogorov Simirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.82189948
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.075
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

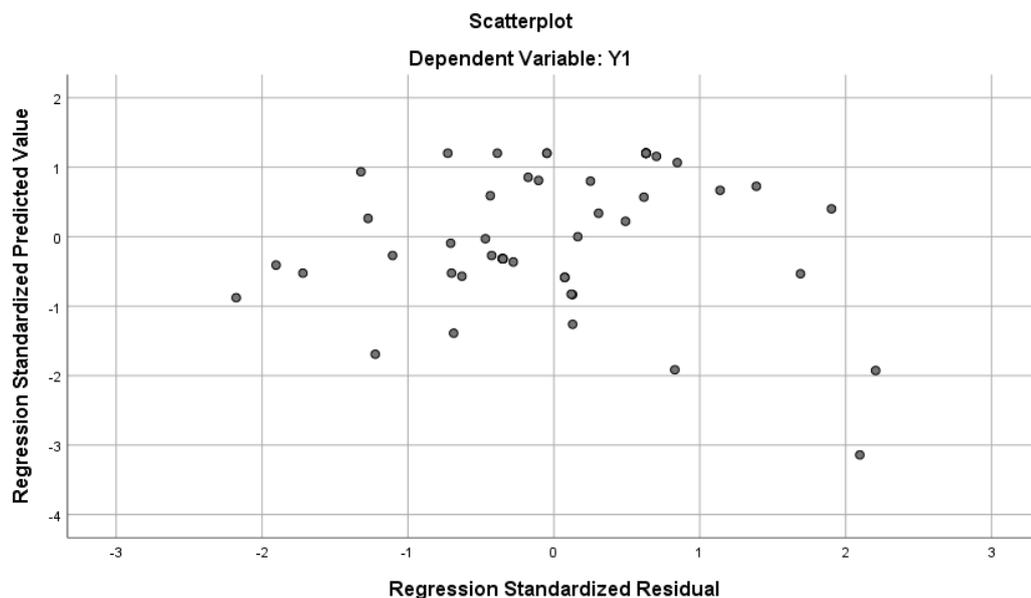
Berdasarkan data pada tabel di atas pada signya terdapat nilai sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal tidak terjadi masalah normalitas

4.3.5. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnyatetap, maka disebut homoskedastitas. Jika *variance* berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y) Prediksi –Y sesungguhnya) yang telah di – studentized. Dasar analisis:

- a. Ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas



Sumber: SPSS (2022)

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat pada *tolance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Berikut adalah hasil uji multikolinearitas.

Hasil uji Multikolineritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	12.580	3.479		3.616	.001		
	X1	.210	.135	.226	1.555	.127	.281	3.554
	X2	-.753	.498	-.238	-1.511	.138	.239	4.191
	X3	1.174	.364	.463	3.225	.002	.288	3.472
	X4	1.248	.269	.501	4.640	.000	.508	1.969

Berdasarkan data di atas dengan nilai tolerance pada variabel X1, X2, X3, X4 $> 0,10$ maka dapat diartikan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolineritas. Berdasarkan data di atas dengan nilai vif pada variabel X1, X2, X3, X4 < 10 maka dapat diartikan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolineritas.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan analisis regresi berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi seperti pada uji asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini seperti: residual yang terdistribusi normal, tidak adanya multikolineritas dan tidak adanya heteroskedastisitas

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.580	3.479		3.616	.001
X1	.210	.135	.226	1.555	.127
X2	-.753	.498	-.238	-1.511	.138
X3	1.174	.364	.463	3.225	.002
X4	1.248	.269	.501	4.640	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis data di atas, dapat dilihat koefisien regresi yang akan dipakai tertera di dalam kolom B. Berdasarkan hasil di atas dapat disusun model regresi sebagai berikut:

$$(Y) \text{ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah} = 12,580 + 0,210 \text{ Perencanaan Anggaran} - 0,753 \text{ Pelaksanaan Anggaran} + 1,174 \text{ Pelaporan / Pertanggungjawaban} + 1,248 \text{ Evaluasi Kinerja} + e$$

Model regresi diatas memiliki interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,580 memiliki arti bahwa apabila semua variabel independen yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban dan Evaluasi Kinerja bernilai 0, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai sebesar 12,580.
2. Nilai koefisien Perencanaan Anggaran sebesar 0,210 memiliki arti bahwa apabila variabel Perencanaan Anggaran mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mengalami kenaikan sebesar 0,210.
3. Nilai koefisien Pelaksanaan Anggaran sebesar -0,753 memiliki arti bahwa apabila variabel Pelaksanaan Anggaran mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mengalami penurunan sebesar - 0,753.
4. Nilai koefisien Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran sebesar 1,874 memiliki arti bahwa apabila variabel Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mengalami kenaikan sebesar 1,874.
5. Nilai koefisien Evaluasi Kinerja sebesar 1,248 memiliki arti bahwa apabila variabel Evaluasi Kinerja mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mengalami kenaikan sebesar 1,248.

4.3.2. Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.580	3.479		3.616	.001
X1	.210	.135	.226	1.555	.127
X2	-.753	.498	-.238	-1.511	.138
X3	1.174	.364	.463	3.225	.002
X4	1.248	.269	.501	4.640	.000

a. Dependent Y

Berdasarkan tabel di atas maka:

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tabel Perencanaan Anggaran mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,127 maka H1 ditolak karena nilai sig > dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tabel Pelaksanaan Anggaran mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,138 maka H2 ditolak karena nilai sig > dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pengaruh Pelaporan / Pertanggung jawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tabel Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,002 maka H2 diterima karena nilai sig < dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tabel Evaluasi Kinerja mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 maka H2 diterima karena nilai sig < dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.3.2.1. Uji f

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1072.287	4	268.072	30.916	.000 ^b
	Residual	390.193	45	8.671		
	Total	1462.480	49			

- a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Uji F dimana nilai signifikan (sig) kurang dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka H5 diterima.

4.3.2.2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1.

Hasil uji koefisiensi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.856 ^a	.733	.709	2.945	1.431

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Hasil tabel di atas menunjukkan nilai R sebesar 0,733 yang artinya korelasi atau hubungan antara variabel x terhadap y sebesar 0,733 atau 73,3%, nilai R yang semakin mendekati 1 (satu) menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen dan dependen semakin kuat (erat). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,709 atau 70,9%, hal ini menunjukkan bahwa variabel y yang dapat dijelaskan oleh variabel x sebesar 70,9% sedangkan sisanya sebesar 0,291 atau 29,1% dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Perencanaan Anggaran (H_1) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan Anggaran (H_2) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (H_3) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja (H_4) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan /Pertanggungjawaban Anggaran, Evaluasi Kinerja (H_5)

berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut hasil hipotesis penelitian ini:

Hasil uji hipotesis

tabel 4 14 uji hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ditolak
H2	Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ditolak
H3	Pelaporan/Pertanggung jawaban berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Diterima
H4	Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Diterima
H5	Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggung jawaban Anggaran, Evaluasi Kinerja berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Diterima

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan satuan uang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. menurut Aprilia (2014) perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah sistem untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun hasil survei lapangan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji parsial pelaksanaan anggaran secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menurut Prastianingrum (2019) dalam pelaksanaan anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas yang telah disahkan pada pemerintah Kab. Pekalongan. pemerintah Kab. Pekalongan juga belum menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja secara baik dan akuntabel. Dukungan terhadap ditolaknya hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Melfariza Sefriyana (2016) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji parsial pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaporan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kab. Pekalongan. Ini berarti semakin baik pelaporan anggaran yang dilakukan oleh SKPD pemerintah Kab. Pekalongan telah mampu menerapkan sistem anggaran yang berbasis terhadap kinerja yang lebih baik. Terbuktinya hipotesis ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 Tahun 2008 dan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran yang menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan. Informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucky (2015) menyatakan bahwa pelaporan /pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dan penelitian yang dilakukan Indriani Yulia Friska (2015) menyatakan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji parsial hasil penelitian ini membuktikan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD pemerintah Kab. Pekalongan . Ini berarti semakin baik evaluasi kinerja yang dilakukan oleh SKPD pemerintah kab. Pekalongan telah mampu menerapkan sistem anggaran yang berbasis terhadap kinerja yang lebih baik. Terbuktinya hipotesis ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Evaluasi kinerja diharapkan dapat memandu dalam hal pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dengan mengevaluasi program atau kegiatan yang sudah dibuat, dilaksanakan hingga dalam bentuk laporan realisasi anggaran pemerintah.

5. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, dan Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji simultan hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perencanaan anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, dan Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini berarti adanya keterkaitan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini sesuai dengan pernyataan Bastian (2006:54) yang menyatakan bahwa keterkaitan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah bahwa upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan keuangan daerah pada khususnya. Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar terciptanya hasil yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran

BAB V

Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja yang diprosikan oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Pekalongan). Berikut beberapa simpulan yang dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian ini :

1. Pengaruh Perencanaan anggaran berdasarkan uji t sebesar $0,127 > 0,05$ tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan, karena disebabkan oleh lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu dan menyebabkan perencanaan tidak terlaksana dengan baik. H_1 ditolak.
2. Pengaruh Pelaksanaan anggaran berdasarkan uji t sebesar $0,138 > 0,05$ tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan, karena pelaksanaan anggaran tidak dilaksanakan dengan tepat. H_2 ditolak.
3. Pelaporan/Pertanggungjawaban anggaran berdasarkan uji t sebesar $0,002 < 0,05$ berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan. H_3 diterima.
4. Pengaruh Evaluasi kinerja berdasarkan uji t sebesar $0,00 < 0,05$ berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan, H_4 diterima.
5. Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pekalongan, H_5 diterima.

5.2 Saran

1. Saran Pemerintah Kabupaten Pekalongan
 - a. Dalam membuat perencanaan anggaran pemda Pekalongan sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 - b. Untuk pelaksanaan anggaran pemda Pekalongan sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh

pelaksanaanya dan memperbaiki system akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.

- c. Dalam hal pelaporan dan evaluasi kinerja perlu adanya monitoring dari pemerintah pusat agar anggaran yang diberikan untuk pemerintah daerah dapat sepenuhnya digunakan untuk keperluan program/kegiatan yang telah disusun untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik dengan ditandai tercapainya visi misi organisasi melalui pengelolaan keuangan pemerintah yang baik.
- d. Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, pemerintah dapat memaksimalkan pencapaian kinerja dengan tetap mengusahakan pencapaian kinerja 100% sesuai dengan visi dan misi kabupaten Pekalongan.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel yang lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diantaranya : kejelasan sasaran anggaran, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan penerapan akuntansi keuangan daerah.
- b. Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah yang sama, disarankan untuk meneliti subjek lain, dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penerapan akuntansi keuangan daerah , system pengendalian internal, dan system pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul *Halim*. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Abdullah, Hilmi. (2005). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta)*. KOMPAK.No.13, Januari-April 2005 Hal: 37-67
- Adisaputro*, Gunawan dan *Asri*, Marwan, (2010), *Anggaran Perusahaan*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPF.
- Adisaputro*, Gunawan. (2010). *Manajemen Perusahaan: Analisis Untuk Perancangan Strategi. Pemasaran*. Yogyakarta: YKPN
- Bangun*, *Andarias*. (2009). *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. (Tesis)
- Bastian*, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dang Panagaman Tamba*, (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Simalungun*. Artikel Ilmiah. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Deni Harianto*, *Kennedy*, *Arumega Zarefar*, (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Artikel Ilmiah. Riau: Universitas Riau
- Edipson Bayer Silalahi, (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. Artikel

Ilmiah. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan

- Elfrida Siregar* (2020) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pertahanan Kota Palembang
- Erlina, Sri Mulyani*, (2007). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama, Medan: USU Press
- Ghozali*, Imam (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali*, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi 4. Semarang: BP-UNDIP.
- Hafiz, Muhammad*. (2016). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi dan kinerja manajerial sebagai variabel moderating (studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar) JOM Fekon, Vol. 4 Nomor 1 (Februari) 2017 Universitas Riau.
- Haryanto*. (2008). Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herawaty, Netty*. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36.
- Husein Umar*. (2008). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kennis*. (1979). Effect of Budgetary Goal Characteristic on Management Attitude and Performance. Accounting Review, Vol.IV No.4, October
- Kukuh Prastianingrum*, (2018). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artikel Ilmiah. Universitas Pakuan Bogor
- Kusumaningrum, Indraswari*. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro : Jawa Tengah.

- Lembaga Administrasi Negara-LAN.* (2003). Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Locke, E.A., Latham G.P.* (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. A 35-Year Odyssey. *American Psychologist*.
- Lubis, Adyanata.* (2016). Basis Data Dasar Untuk Mahasiswa Ilmu Komputer. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Lutfiah Vrigita Budiani,* (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, kualitas Sumber daya manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia (STIESIA)
- M Nafarin.* (2012). Penganggaran Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo.* (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muhammad Sya' Roni* (2018)Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kota Surabaya
- Mulyadi,* (2011). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Nasution, D. A. D.* (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti.* (2010). Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Sadjiarto, Arja.* (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal. Akuntansi dan Keuangan Vol 2, No. 2.*
- Septiyani, Anna.* (2010). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi (studi empiris pada Pemerintah Kota Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Welsch, Hilton, Gordon.* (2000). Anggaran Perencanaan dan Pengendalian. Laba, diterjemahkan oleh Purwaningsih,Maudy Warow,Edisi 5, *Buku I.* Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Petuniuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Risqilah
Alamat : pejareman,RT.10,RW.05
Kel/Kec.Pegandom/Karangdadap,Kab.Pekalongan.
Jawa Tengah

Tempat dan Tanggal Lahir : Batang, 19 Desember 1998

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : MI Tholabuddin Masin 01
- SMP : SMP Arrahmaniyah Depok
- SMA : SMK Gatra Praja Pekalongan
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor, Juli 202

Peneliti,

Muthia Risqilah

L

A

M

P

I

R

A

N



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 575 /WD.1/FEB-UP/VI/2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

29 Juni 2022

Kepada : Yth. Pimpinan

DINAS TENAGA KERJA
DINAS UMKM DINAS
PERIKANANLITBANG
BAPPEDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BAPENDA
DINAS PARIWISATA

Dengan hormat

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Muthia Risqilah
NPM : 022118307
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM

LEMBAR KUESIONER

Para Respoden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Muthia Risqilah
NPM : 022118307
Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi
Universitas : Pakuan Bogor

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**

PEMERINTAH (Studi Kasus SKPD Kab. Pekalongan)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Muthia Risqilah

KUESIONER PENELITIAN

A. Demografi Responden

Nama Instansi :

Nama Responden :

Tanggal Pengisian :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Latar Belakang Pendidikan :

- Ekonomi / Akuntansi
- Hukum
- Teknik
- Sosial
- Lainnya

Pendidikan Terakhir :

- SLTA/Sederajat
- Diploma (D3)
- Strata 1 (Sarjana)
- Strata 2 (Master)
- Strata 3 (Doktor)

Jabatan :

- Kepala Badan/Dinas/Instansi
- Sekretaris/Kabid/Kabag
- Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie
- Staf

Lama Bekerja :

- 1 – 5 tahun
- 6 – 10 tahun
- 11–15 tahun
- 16–20 tahun
- ≥ 21 tahun

B. Pernyataan mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Terimakasih Bapak/Ibu, telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (X).

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju respondent terhadap materi pertanyaan/pernyataan.

Dalam pernyataan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja dibagi menjadi 4 (empat) variabel. Variabel pertama adalah perencanaan anggaran, variabel kedua pelaksanaan anggaran, variabel ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, dan variabel keempat adalah evaluasi kinerja. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Keterangan	(STS)	(TS)	(R)	(S)	(SS)
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

PERENCANAAN ANGGARAN (X1)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	R	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai.					
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya.					
3. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tersebut.					

<p>4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam menyusun Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).</p>					
<p>5. Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) antara kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).</p>					
<p>6. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.</p>					
<p>7. Dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.</p>					
<p>8. Dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta pembahasannya mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sendiri</p>					
<p>9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan kompilasi Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) menjadi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi.</p>					
<p>10. Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evaluasi APBD dari kabupaten/kota.</p>					

PELAKSANAAN ANGGARAN (X2)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	R	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dalam pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan.					
2. Dokumen Anggaran Kas dan Dokumen Pelaksanaan anggaran digunakan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD.					
3. SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas.					

PELAPORAN / PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (X3)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	R	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.					
2. Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dia buat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.					
3. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.					

EVALUASI KINERJA (X4)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	R	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.					
2. Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah ditetapkan sesuai dengan target.					
3. Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran.					

PERNYATAAN MENGENAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (Y)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	R	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Adanya keterkaitan yang erat antara program dan kebijakan dengan pencapaian kinerja.					
2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pimpinan					
3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					
5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang telah selesai dilaksanakan.					
6. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan					
7. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					

9. Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					
10. LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					

Dokumentasi penyebaran Kuisisioner

